

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta fakta yang teridentifikasi. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan global yang kemudian mampu mempengaruhi dan merembesi isu regional dan isu daerah.

1.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat

terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Barru secara makro dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun masih tetap berada pada kelompok menengah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran terus menunjukkan penurunan, namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia harus lebih dimaksimalkan lagi.

Persoalan akses dan mutu pelayanan dasar juga perlu terus ditingkatkan. Program-program pro rakyat, pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment harus terus dikembangkan secara lebih adil dan proporsional

2) Belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat.

Berbagai indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi makro dan sektoral, peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, dan jumlah tabungan masyarakat, serta maraknya berbagai investasi menandakan adanya kondisi ekonomi yang terus membaik. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati sebagian kecil

penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan Bergeraknya sektor riil terutama sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM.

Permasalahan lainnya adalah sulitnya memprediksi perkembangan variabel makro ekonomi seperti suku bunga global, harga minyak, nilai mata uang rupiah, harga BBM, dan inflasi. Variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karenanya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal harus lebih ditingkatkan

3) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barru masih terbatas. Meskipun anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menyerap porsi anggaran yang besar dalam APBD, namun karena luasnya wilayah Kabupaten Barru, maka kebutuhan terhadap infrastruktur selalu jauh lebih besar dari pada kemampuan anggaran yang ada. Belum lagi infrastruktur yang harus diperbaiki karena sudah rusak juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Infrastruktur yang ada juga belum merata pada semua wilayah kecamatan. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur pada daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Barru bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.

4) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan dan investasi agar bisa memberikan pelayanan prima yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan.

Kapasitas birokrasi juga masih perlu dimaksimalkan. Masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum optimal kinerjanya karena masih terkendala soal kelembagaan dan ketatalaksanaan. Penggunaan teknologi informasi, sistem informasi dan manajemen serta e-government juga belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif.

Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih perlu diperhatikan. Organisasi perangkat daerah masih perlu didorong dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat, efektif, produktif, bersih, transparan dan akuntabel. Sedangkan PNS perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, pegang teguh etika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara.

5) Belum optimalnya pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan

Pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan belum optimal. Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rentang kendali pelayanan publik perlu diperpendek dengan memberdayakan peran kecamatan. Jenis pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dikelola oleh kecamatan seyogyanya diserahkan kepada kecamatan. Penyerahan tersebut tentu disertai dengan dukungan regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem, dan penganggaran. Dengan demikian jangkauan pelayanan akan lebih dekat dengan masyarakat yang tersebar di 7 kecamatan.

Penguatan desa dan kelurahan juga perlu mendapat perhatian. Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa akan mengelola dana yang cukup besar, maka kesiapan desa perlu difasilitasi dan didorong untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sejauh mana dana tersebut

efektif berdampak pada perbaikan kinerja sektor pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta bagaimana meminimalkan penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana tersebut akibat keterbatasan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas sumber daya manusia khususnya di perdesaan.

Sedangkan kelurahan sebagai perangkat di bawah kecamatan juga perlu didorong agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di kelurahan.

6) Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Meskipun sudah ada aturan yang sangat rinci, persoalan aset daerah hingga saat ini masih mengalami beberapa kendala. Salah satu persoalan yang muncul terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran. Dalam praktek pengelolaan aset daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan seperti pengadaan kendaraan operasional. Diharapkan guna kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka pemerintah daerah dapat mengadakan kendaraan dinas operasional Satuan Perangkat Daerah maupun struktur dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan yang dimaksud harus sesuai dengan analisis kebutuhan dengan asas efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dapat dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kepentingan rakyat serta menganut prinsip transparansi, taat asas dan tertib administrasi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan bisa diidentifikasi dengan melihat gap antara target dan capaian. Tabel 4.1 memperlihatkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barru selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru

No	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1	Pendidikan			
1.1	Angka melek huruf	Melampaui (>) angka melek huruf 96,56 persen	1. Masih ada penduduk usia lanjut yang tidak bisa baca tulis 2. Budaya membaca yang rendah 3. Kurangnya fasilitas yang mendorong budaya membaca	1. Meningkatkan budaya membaca dengan menyediakan taman baca, Koran dan internet masuk desa 2. Memfasilitasi pemberantasan buta huruf
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Belum Tercapai (<) Angka rata-rata lama sekolah 7,31 tahun	1. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 2. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. 3. Pendidikan gratis belum maksimal	1. Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah 2. Perubahan pola pikir dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan
1. 3	Angka Partisipasi Kasar			
1.3.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	Belum Tercapai (<) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A 107,04 persen	Akses dan layanan Pendidikan masih rendah pada jenjang SD/MI/ Paket A	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses dan layanan sekolah pada jenjang SD/MI/ Paket A
1.3.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Melampaui (>) Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 105,98 persen	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/ Paket B yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs/Paket B

1.3.3	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C	Melampaui (>) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C 85,30 persen	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C yang tidak sesuai usia sekolah (16-18 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	Melampaui (>) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A 95,70 persen	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SD/MI/ Paket A yang tidak sesuai usia sekolah (7-12 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SD/MI/ Paket A
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Melampaui (>) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 87,19 persen	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B yang tidak sesuai usia sekolah (13-15) tahun	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs/Paket B
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	Belum Tercapai (<) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 60,73 persen	Masih banyak usia dibawah 16 tahun dan usia diatas 18 tahun berada pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Sosialisasi dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang disatuan pendidikan
1.5	Pendidikan dasar:			
1.5	Angka partisipasi sekolah	Melampaui (>) Angka partisipasi sekolah sebesar (SD) 95.70	Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
		Belum tercapai (<) Angka partisipasi sekolah sebesar (SMP) 87.19	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana diwilayah pelosok dan terpencil	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana diwilayah pelosok dan terpencil

1.5.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah sebesar (SD) 1:85,93, (SMP) 1:192.02	Penyebaran sekolah yang belum merata	Pemerataan ketersediaan sekolah terutama dilingkungan pemukiman penduduk
1.	Rasio guru/murid	Melampaui (>) Rasio guru/murid sebesar (SD) 1:12.57, (SMP) 1:16.23	Distribusi guru proporsional belum maksimal	Penempatan guru sesuai kebutuhan dan bidang studi
	Pendidikan menengah:			
	Angka partisipasi sekolah	Melampaui (>) Angka partisipasi sekolah sebesar 60.73	Masih kurangnya Ruang belajar dan lembaga SMA/SMK	Penambahan ruang kelas baru dan lembaga SMA/SMK
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:352.71	Belum maksimalnya sarana dan prasarana sekolah	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
	Rasio guru terhadap murid	Melampaui (>) Rasio guru terhadap murid 1:19.15	Belum meratanya distribusi guru	Penempatan guru sesuai kebutuhan dan bidang studi
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Melampaui (>) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 96,56	Masih tingginya angka usia lanjut (diatas 45 tahun) yang buta aksara	Keberlanjutan program pemberantasan buta aksara
	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Melampaui (>) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik sebesar 91.56	Masih ada bangunan sekolah dalam kondisi yang kurang baik	Peningkatan jumlah anggaran khususnya untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung kelas

	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik sebesar 96.25	Masih ada bangunan sekolah dalam kondisi yang kurang baik	Peningkatan jumlah anggaran khususnya untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung kelas
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 70.77	Masih kurangnya lembaga PAUD	Peningkatan lembaga PAUD
	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Melampaui (>) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,12	Masih kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan	Meningkatkan pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Melampaui (>) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0.41	Masih kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan	Meningkatkan pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Melampaui (>) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebesar 0.25	Masih kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan	Meningkatkan pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan
	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Sesuai (=) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/ guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan

	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Sesuai (=) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Sebesar 100		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Sesuai (=) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebesar 100		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Melampaui (>) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 101,71	Adanya penduduk/warga usia sekolah khususnya di usia 12-15 yang lebih memilih sekolah di Kabupaten Barru	Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Melampaui (>) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Sebesar 87,46	1. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan pendidikan 2. Masih kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan	1. Mendorong mempercepat program pendidikan wajib 12 tahun 2. Peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Melampaui (>) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 91,69	Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV	meningkatkan kualifikasi guru minimal S1/D-IV
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Angka kelangsungan hidup bayi sebesar 99,80	1. Masih adanya angka kematian bayi. 2. Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil 3. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibudananak. 2. Memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap ibu hamil dan menyusui.

2.2	Angka Usia Harapan Hidup	Belum Tercapai (<)	Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat	Meningkatkanderajat kesehatan masyarakat melalui PHBS
	Persentase balita gizi buruk	Belum tercapai Persentase balita gizi buruk 0,06 %	rendahnya pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang 2. Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk
	Rasio posyandu persatuan balita	Rasio posyandu per satuan balita 1 : 53	Menurunnyajumlah balitayang dilayani di posyandu	Meningkatkan pemerataanP osyandu
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Belum Tercapai (<) Rasio puskesmas persatuan penduduk sebesar 1 : 14.268, Rasio Poliklinik persatuan penduduk sebesar 0, Rasio pustu persatuan penduduk sebesar 1 : 5.188,39	Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlahpemerataan fasilitas kesehatan; 2. Koordinasi antartingkatan pemerintahan unuk penyediaan saranadan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	RasioRumahSakit persatuan penduduk sebesar 1 : 171.217	Kurangnya jumlah RS sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokterper satuan penduduk sebesar 1 : 5.904,03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah dokter 2. Tidak meratanya sebaran dokter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah dokter 2. Perlu dibuat regulasi/ aturan agar penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan

	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Rasio tenaga medis persatuan penduduk sebesar 1 : 2.952,02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga medis 2. Tidak meratanya sebaran tenaga medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah tenaga medis 2. Perlu dibuat regulasi/aturan agar penempatan tenaga medis disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Belum Tercapai (<) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 63,03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi komplikasi masih rendah 2. Puskesmas belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas bidan 2. Penguatan puskesmas
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Belum Tercapai (<) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 91,34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua Bidan Desa menetap di wilayah kerjanya 2. ANC(Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal 3. Tidak semua persalinan oleh nakes dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan regulasi tentang Bidan Desa 2. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 3. Peningkatan fasilitas pelayanan KIA disarana pelayanan kesehatan
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Melampaui (>) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization sebesar 98,18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi petugas membawa dampak ketrampilan petugas terlatih 2. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi 3. Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan Menganalisis data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi 2. Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat 3. Memperkuat kemitraan dengan lintas sektorterkait, Lembaga pendidikan, Organisasi

			4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat	Kemasyarakatan untuk menjamin ketersediaan petugas yang terampil
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Sesuai (=) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100	Masih adanya persepsi masyarakat yang keliru terhadap gizi buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Medis secara intensif 2. Penanganan Gizi Buruk ditingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat) 3. Perlu regulasi tentang Ketenagaaan 4. Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB Gizi Buruk
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA	Belum Tercapai (<) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA sebesar 69,10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program TBDOTS (Directly Observed Treatment Short/ Pengobatan Jangka Pendek) 2. Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program TBDOTS 2. Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial) Program TB
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Sesuai (=) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka bebas jentik masih rendah 2. Masih terjadi KLBD BD di beberapa lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 2. Peningkatan PHBS
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 29,61 %	Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)	Peningkatan ketersediaan obat di rumah sakit/ balai kesehatan masyarakat membuat jejaring antara rumah sakit dengan penyedia layanan daerah
	Cakupan kunjungan bayi	Melampaui (>) Cakupan kunjungan bayi sebesar 100,36 %	Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana

	Cakupan puskesmas	Cakupan puskesmas sebesar 171,43	Lokasi yang tidak strategis	Pengadaan poskesdes di setiap desa/ kelurahan yang belum ada sarana kesehatannya
	Cakupan puskesmas pembantu	Cakupan puskesmas pembantu sebesar 60	Rendahnya kualitas dan jumlah sarana pustu	1. Perbaikan/rehab dan penambahan pustu 2. Pemenuhan tenaga agar sarana dapat berfungsi dengan baik
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,38	Rendahnya kualitas jaringan jalan	Meningkatkan kualitas jaringan jalan
	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi sebesar 16,53	Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.	Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumberdaya air
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1:654,56	Masih kurangnya tempat ibadah	Penambahan sarana dan prasarana tempat ibadah
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 79,24	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum optimalnya PHBS oleh masyarakat.	1. Peningkatan rumah tanggayang dapat mengakses sanitasi yang layak 2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.

	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk sebesar 0,21	Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; 2. Mengurangi timbunan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni sebesar 0,17	Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; 2. Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;
	Rasio permukiman layak huni	Rasio permukiman layak huni sebesar 8,24	Masih terdapat luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
	Panjang jalan dilalui Roda 4	Panjang jalan dilalui Roda 4 sebesar 0,25	Penurunan rasio panjang jalan yang dilalui roda 4 ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding pertumbuhan jalan	Meningkatnya rasio jalan yang dapat dilalui roda 4 menunjukkan kegiatan transportasi yang aktif sebagai bagian guna mendukung pergerakan perekonomian
	Panjang jalan Kab. dalam kondisi baik (> 40 Km /Jam	Panjang jalan Kab. dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) sebesar 62,18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kinerja jaringan jalan 2. Terbatasnya jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja jaringan jalan 2. Penambahan jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya

	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) sebesar 1,66	Masih terbatasnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m hanya terdapat di beberapa kecamatan antara lain	Peningkatan jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m hanya terdapat di beberapa kecamatan antara lain
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang saluran drainase terbangun masih diperlukan penambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase 2. Rendahnya kesadaran / peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran / peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase 2. Komitmen penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Belum tercapai (<) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 46,28%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya kualitas pembangunan sarana dan prasarana irigasi 2. Belum optimalnya pemanfaatan irigasi karena pembangunan yang memperhatikan sumber air dan kondisi topografi 	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi
	Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh 0,26	Belum optimalnya cakupan pelayanan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas dan cakupan sarana dan prasarana.
	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman			
	Rumah tangga pengguna air bersih	Rumah tanggapengguna air bersih sebesar 37.799 RT	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku airminum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan

	Rumah tangga pengguna listrik	Rumah tangga pengguna listrik sudah mencapai 35.872	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah	Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baruterbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi.
	Rumahtangga berSanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 34.020	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.	Peningkatan rumah tanggayang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi disekolah dan tempat umum sebagai upayameningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	Lingkungan pemukiman kumuh	Lingkungan pemukiman kumuh seluas 310,620 ha	1. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh; 2. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.	1. Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh; 2. Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,004	belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang	Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		Belum terawasinya dengan baik pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat	Pendataan dan penertiban bangunan yang ber IMB yang harus sesuai dengan RTRW
	Ruang publik yang berubah	Ruang publik yang berubah		Pengawasan terhadap pemanfaatan ruangan public dengan mengacu pada

	peruntukannya	peruntukannya sebesar 0		RTRW
	Ketaatan terhadap RTRW		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronnya program pembangunan antar sector dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang 2. Belum tersedianya instrument pengendalian keruangan yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertibnya pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW Kabupaten 2. Optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW
	Luas wilayah produktif		Posisi Kabupaten Barru sebagai kawasan strategis nasional untuk pengembangan ekonomi	Meningkatkan fungsi kawasan strategis nasional
	Luas wilayah industri		Kurangnya infrastruktur yang memadai	Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah yang berbatasan dengan perkotaan
	Luas wilayah banjir	Luas wilayah banjir sebesar 1,03	Belum sinkronnya program pembangunan antar sector dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang	Penataan terhadap tata ruang
	Luas wilayah kekeringan	Luas wilayah kekeringan sebesar 4,30	Belum sinkronnya program pembangunan antar sector dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang	Penataan terhadap tata ruang
	Luas wilayah perkotaan	Persentase luas wilayah perkotaan adalah 0,42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronnya program pembangunan antar sector dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang 2. Belum tersedianya instrument pengendalian keruangan yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang 	Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah kecamatan yang berbatasan dengan perkotaan

	Perencanaan			
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ADA	1. Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada 2. Perubahan tahun dasar BPS menyebabkan beberapa target indicator makro telah terpenuhi	Perlunya dilakukan revisi dokumen RPJPD
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ADA	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ADA	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 101,23	Belum optimalnya konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Konsistensi penjabaran program dengan melakukan asistensi penyalarsan program yang ada di RPJMD dan RKPD
	Perhubungan			
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan sebesar 0,080	Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru	Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan

	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 4.592.281 orang	Belum tersedianya data base tentang tarikan dan bangkitan	Penyusunan masterplan atau survey kinerja lalu lintas, pergerakan bangkitan dan tarikan perjalanan
	Rasio ijin trayek	Rasio ijin trayek sebesar 0,00149		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal ini sopir memiliki ijin trayek
	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum 1.971	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian tepat waktu 2. Kurang memadainya operasional prosedur perawatan alat uji, Pengujian kendaraan bermotor mekanis 3. Kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor 	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengujian KIR angkutan umum
	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan : - Laut = 5 -Udara = 0 -Terminal Bis = 5	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan pelabuhan laut dan terminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut dan terminal serta Peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khusus pada kawasan pedesaan 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
	Angkutan darat	Jumlah Angkutan darat sebanyak 2.115 kendaraan	Belum adanya masterplan transportasi (survey kinerja lalu lintas, pergerakan bangkitan dan tarikan perjalanan serta rencana induk angkutan)	Sebagian masyarakat masih membutuhkan angkutan umum dan barang

	Kepemilikan KIR angkutan umum	Kepemilikan KIR angkutan umum 0.019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian tepat waktu 2. Kurang memadainya operasional prosedur perawatan alat uji, Pengujian kendaraan bermotor mekanis 3. Kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor 	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal ini sopir memiliki ijin trayek
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama 20 menit	System antrian kurang tertib, pemilik kendaraan menginginkan pelayanan cepat tanpa melalui prosedur	Adanya SOP pengujian berkala
	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum sebesar Rp. 25.000	Pemilik kendaraan masih ada yang mempergunakan jasa pihak ketiga / calo dalam pengurusan pengjian kendaraan	Ditetapkannya aturan biaya pengujian kelayakan angkutan umum melalui PERDA
	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase Pemasangan Rambu-rambu sebesar 21,16	Masih banyaknya jalan-jalan yng strategis dan rawan kecelakaan yang membutuhkan rambu-rambu	Meningkatnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum sebesar 4.553.207Orang dan 11.383 Ton	Bebelum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan pelabuan laut dan terminal	Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi ke daerah Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarkat lebih memilih angkutan umum
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang/barang melalui dermaga pertahun sebanyak 39.074 	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan pelabuan laut dan terminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas ppelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut dan terminal 2. Peningkatan aksebilitas

	terminal per tahun	2. orang dan 7.297 barang Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun sebanyak 4.553.207 orang		<p>pelayanan transportasi khusus pada kawasan pedesaan</p> <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum</p>
	Lingkungan Hidup			
	Presentase penanganan sampah	Presentase penanganan sampah sebesar 17,03	Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah	<p>1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)</p> <p>2. Meningkatkan optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan</p>
	Persentase Penduduk berakses air minum	Persentase Penduduk berakses air minum sebesar 50,13	<p>1. Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum</p> <p>3. Masih banyaknya pengguna air bersih khususnya masyarakat pedesaan yang belum terjangkau PDAM</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum</p> <p>2. Penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum</p> <p>3. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan</p>
	Persentase Luas		Masih rendahnya partisipasi	Peningkatan partisipasi

	pemukiman yang tertata		masyarakat dalam penataan lingkungan	masyarakat
	Pencemaran status mutu air		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha/ kegiatan 2. Masih rendahnya tingkat ketaatan setiap usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha / kegiatan 2. Pengoptimalan pemantauan dan pengawasan disetiap usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan limbah
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal sebesar 77,78	Belum maksimalnya kualitas mutu dan dokumen AMDAL guna mengoptimalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan	Meningkatkan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 8,65	Belum maksimalnya keberadaan sarana persampahan berupa TPS terutama diwilayah perdesaan dibandingkan pertambahan jumlah penduduk	Penambahan jumlah sarana persampahan
	Penegakan hukum lingkungan	Persentase Penegakan hukum lingkungan sebesar 100	Masih kurangnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dan institusi serta system informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan 2. Sosialisasi SOP pengaduan kerusakan lingkungan kepada masyarakat
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih sebesar 88,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman 2. Masih terbatasnya kapasitas air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya konservasi sumber air baku guna memenuhi pelayanan air bersih ditingkat rumah tangga

	bersih	63	baku untuk memenuhi kebutuhan RT	
	Pertanahan			
	Persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat		Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan lahan	Adanya PRONA sertifikasi lahan
	Persentase luas lahan bersertifikat		Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah	Adanya PRONA sertifikasi lahan
	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara sebesar 100		
	Penyelesaian izin lokasi	Persentase Penyelesaian izin lokasi sebesar 100		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,89	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,52	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah sebesar 1		
	Kepemilikan KTP	Persentase Kepemilikan KTP sebesar 89,36	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan

	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persentase Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 26,25	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Masih manualnya pengoperasian system informasi administrasi kependudukan (SIK) sehingga penyajian database dalam bentuk bac up data dari SIK	Peningkatan kapasitas apatur dalam penyusunan database kependudukan yang akurat
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Masih adanya penduduk yang belum memperbaharui dokumen kependudukannya terutama penduduk usia lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan 2. Identifikasi aparat desa/kelurahan terkait dokumen kependudukan warganya
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 3,29	Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di bidang politik, jabatan-jabatan public dan dibidang ekonomi	Mengefektifkan jaringan kelembagaan dalam pengarusutamaan gender dan anak dalam berbagai produk perundang-undangan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar lain penguatan kerja PUG, Fungsionalisasi Focal Point PUG
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 3,29	Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan	Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan untuk posisi tawar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

			terhadap sumber daya	
	Rasio KDRT	Rasio KDRT sebesar 0,043	Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pembentukan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 0		
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 19,65	<p>Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan piranti hukum, analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan - Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG - Masih rendahnya pemaaman tentang konsep dan isu gender, nilai-nilai kesetaraan gender, manfaat PUG dalam pembangunan 	Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan untuk posisi tawar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 100		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran dinas terkait melalui peningkatan kapasitas aparatur
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 1,4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran ber KB 2. Masih kurangnya partisipasi tokoh agama dalam penyuluhan KB 	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita dan remaja
	Rasio akseptor KB	Rasio akseptor KB sebesar 71,55	Kurangnya PUS muda yang ber KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan PUS dengan peserta KB aktif dan memastikan PUS baru terlayani 2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita remaja
	Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB aktif sebesar 71,55	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB 2. Masih kurangnya animo masyarakat menjadi peserta KB 3. Masih kurangnya alat kontrasepsi yang disediakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat 2. Meningkatkan pengadaan alat kontrasepsi
	Keluarga Pra dan Sejahtera I	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 30.59	Kurangnya animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan karakter keluarga	Mengoptimalkan pemberdayaan keluarga dan mendorong setiap anggota keluarga untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan karakter keluarga.

	Sosial			
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebesar 6	Terbatasnya anggaran	Optimalisasi anggaran
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebesar 986	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS 2. Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi ketersediaan data PMKS yang akurat 2. Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 7,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial karena focus di aspek lain salah satunya pengentasan kemiskinan 2. Semakin kompleksnya penyandang masalah sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 2. Peningkatan dan pemertaan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
	Tenaga Kerja			
	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,99	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena tidak kesesuaian kompetensi yang	Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja

			dibutuhkan	
	Angka partisipasi angkatan kerja	Persentase Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 46,97	Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja
	Angka sengketa pengusaha, pekerja pertahun	Persentase angka sengketa pengusaha, pekerja pertahun sebesar 1,46	Belum adanya regulasi daerah tentang ketenagakerjaan	Penetapan regulasi daerah tentang ketenagakerjaan dan implementasinya
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja sebesar 47,42	1. Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja 2. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja	Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
	Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 16,33	1. Terbatasnya lapangan kerja 2. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia	1. Pembukaan lapangan kerja baru 2. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,8	1. Tidak seimbangnya antara angkatan kerja dengan peluang kerja yang ada 2. Masih terbatasnya informasi pasar kerja	1. Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru 2. Mengintensifkan penyebaran lapangan kerja dan pengembangan system informasi pasar kerja melalui online sistem
	Keselamatan dan perlindungan kerja	Persentase Keselamatan dan perlindungan kerja sebesar 14,6	Terbatasnya Jamsostek bagi tenaga kerja	Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menerima Jamsostek
	Perselisihan buruh dan pengusaha	Persentase Perselisihan buruh	Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan	Meningkatkan peran pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam penyelesaian

	terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sebesar 0	pengusaha	perselisihan
	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 754	Mahalnya biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi	Penyediaan bantuan biaya/ beasiswa
	Rasio ketergantungan	Rasio ketergantungan sebesar 55,83	Naiknya presentase penduduk yang belum dan tidak produktif	Meningkatkan program yang erkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi/KB
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif sebesar 81,36	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi 2. Kurangnya regulasi sector ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi 2. Pembuatan regulasi sector ekonomi yang berpihak pada koperasi
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM sebesar 1.571		
	Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM sebesar 0		
	Usaha Mikro dan Kecil	Usaha Mikro dan Kecil sebesar 18.610		
Penanaman Modal				
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 426	Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi investasi	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi dan penyusunan potensi serta peluang investasi yang lengkap

	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp. 841.535.650.684	Masih kurangnya regulasi dan infrastruktur	Meningkatkan promosi investasi dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat
	Kebudayaan			
	Jumlah grup kesenian	Jumlah grup kesenian sebesar 19	Kurangnya sosialisasi tentang pembentukan grup kesenian secara resmi	
	Jumlah gedung	Jumlah gedung Kesenian sebesar 1	Minimnya gedung kesenian yang representative	Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebesar 6	Masih kurangnya fasilitas pemerintah Rendahnya partisipasi masyarakat	Adanya agenda yang tersistematis
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebesar 5	Masih kurangnya gedung kesenian yang refresentatif	Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kesenian
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 57,69	Masih banyak warisan budaya yang belum terdaftar	Inventarisasi warisan budaya
	Kepemudaan dan Olahraga			
	Jumlah klub olahraga	Jumlah klub olahraga sebesar 81	Belum optimalnya pembinaan klub-klub olahraga	Peningkatan pembinaan klub-klub olahraga.

	Jumlah gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga sebesar 8	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda sebesar 105	Belum terpolanya pemberdayaan pemuda	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemberdayaan pemuda dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga sebesar 133	Belum terpolanya permasalahan dan pembibitan olahraga	Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan sebesar 35	Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda	Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktivitas dan prestasi
	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga sebesar 41	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebesar 1	Masih kurangnya sarana dan prasarana gelanggang remaja	Rehabilitasi gelanggang / balai remaja. Perlu melibatkan pihak swasta
	Lapangan olahraga	Lapangan olahraga sebesar 0,92	Rendahnya kualitas lapangan olahraga	Ketersediaan lahan dan melibatkan pihak swasta peningkatan pemeliharaan dan kualitas lapangan olahraga
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM,	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kurangnya kesadaran ormas dan LSM Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas/LSM	Penguatan kelembagaan ormas / LSM Peningkatan SDM anggota Ormas melalui kegiatan pembinaan

	Ormas dan OKP	sebesar 1 Kegiatan		
	Kegiatan pembinaan politik daerah	Pembinaan politik daerah sebesar 1 kegiatan	Adanya parpol yang bermasalah dalam kepengurusan	Optimalisasi peran dan fungsi parpol
	Pemerintahan Umum			
	Pertumbuhan PDRB	Melampaui (>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi masih di dominasi factor konsumsi ketimbang factor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berlebihan 2. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi sector pertanian terutama sub sektor tanaman pangan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan kemampuan daya beli masyarakat 2. Terbukanya kesempatan kerja 3. Berkurangnya jumlah penduduk miskin 4. Peningkatan kegiatan ekonomi
	Laju Inflasi Kab. Barru	Melampaui (>)	Laju inflasi Kabupaten Barru sampai saat ini tidak pernah dihitung hanya mengikuti Kabupaten/Kota terdekat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat 2. Peningkatan Retribusi Daerah 3. Pengendalian harga dan distribusi barang 4. Keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan
	PDRB Per kapita	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing masing sektor 2. Kurangnya lapangan pekerjaan Ada kebocoran wilayah (kecenderungan belanja diluar Kabupaten) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan nilai Tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan
	Persentase penduduk miskin	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat penghasilan 2. Kurangnya lapangan kerja baru dan akses lapangan pekerjaan 	1. Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah

				2. Percepatan penciptaan lapangan usaha
	PDRB Harga Berlaku	Belum Tercapai (<)	1. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. 2. Faktor konsumsi daerah yang tinggi dibanding faktor investasi menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. 3. Kurangnya industri pengolahan	1. Membuka lapangan kerja baru 2. Meningkatkan nilai tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan
	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka kriminalitas yang tertangani sebesar 154	1. Kurangnya sosialisasi hukum 2. Kurangnya aparat penegak hukum	1. Meningkatkan sosialisasi hukum 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 1:1287,35	Belum berimbangnnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk sebesar 1:148,11	Belum berimbangnnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 1:8,33	Belum optimalnya peran masyarakat dalam memanfaatkan siskamling	Meningkatkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
	Pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08	Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Ketersediaan infrastruktur yang baik dan merata, Iklim investasi yang kondusif.
	Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan sebesar	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat Penurunan beban pengeluaran

		9,37		masyarakat
	Penegakan PERDA	Persentase Penegakan PERDA sebesar 0	Terbatasnya PPNS penegak PERDA	Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Cakupan patroli petugas Satpol PP sebesar 10	1. Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas satpol PP 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol ptugas Satpol PP
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten sebesar 100		Ketersediaan tenaga penyidik
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten sebesar 0,49	Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah penduduk	Penempatan linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten sebesar 0,004	Luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilaya-wilayah kecamatan
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jarak tempuh yang jauh ke wilayah kebakaran	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilaya-wilayah kecamatan

	Kebakaran (WMK)	sebesar 94,74		
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sebesar 96		
	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Sistim Informasi Manajemen Pemda sebesar 2		
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada		
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 5.922.834	Masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan	Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 48,18		
	Produktivitas total daerah	Produktivitas total daerah sebesar 78.64		
	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jenis dan jumlah bank dan cabangsebanyak 6	Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kecamatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa bank
	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	Jenis dan jumlah perusahaan		

	dan cabang	asuransi dan cabang sebanyak 0		
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel sebanyak 16	persentase jumlah penginapan yang belum merata di setiap wilayah kecamatan.	
	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas sebesar 7,77	Masih tingginya angka kriminalitas akibat sosialisasi hukum yang kurang	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban Mengaktifkan kamtibmas
	Lama proses perijinan		Belum terintegrasinya aplikasi sistem pelayanan perizinan pada setiap jenis izin yang dikeluarkan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan perizinan
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah			
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda terkait perijinan sebanyak 2, Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa sebanyak 1, Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan sebanyak 1	Belum efektifnya pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha	Efektifitas pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha
	Persentase desa berstatus	Persentase desa berstatus	Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya local desa

	swasembada terhadap total desa	swasembada terhadap total desa sebanyak 1 desa	lokal	
	Pertanian			
	Regulasi ketahanan pangan	Tidak ada	Masih rendahnya kapasitas SDM dalam penyusunan perda	Peningkatan SDM Aparatur
	Ketersediaan pangan utama	Persentase Ketersediaan pangan utama sebesar 40,99	Masih tingginya ketergantungan bahan pangan pokok beras	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanya 1 kelompok	Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa (hanya 1 kelompok binaan setiap LPM)	Pembinaan terhadap LPM agar meningkatkan kelompok binaan menjadi 5 kelompok
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa	Pembinaan terhadap PKK agar meningkatkan kelompok binaan
	Jumlah LSM	Jumlah LSM sebanyak 23		Fasilitasi LSM
	LPM Berprestasi	Tidak ada LPM Berprestasi	Masih rendahnya kinerja LPM dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Fasilitasi penguatan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa/kelurahan
	PKK aktif	PKK aktif sebanyak 100	Masih rendahnya kapasitas SDM Kader PKK, utamanya Kader PKK di tingkat desa/kelurahan	Meningkatkan pembinaan/ supervisi terhadap Kader PKK

	Posyandu aktif	Posyandu aktif Sebanyak 56,68	Masih rendahnya kapasitas SDM Kader dan masih terbatasnya sarana dan prasarana Posyandu	Meningkatkan kapasitas SDM kader dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat sebesar 30	Menurunnya Nilai gotong royong dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan	Mendorong peningkatan dan swadaya masyarakat
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat sebesar 100	Kurangnya kepedulian masyarakat dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan	Meningkatkan pembinaan terhadap tim pemelihara terhadap hasil pembangunan
	Statistik			
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		
	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		
	Kearsipan			
	Pengelolaan arsip secara baku	Pengelolaan arsip secara baku sebanyak 38,46%	Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		Masih terbatasnya SDM Belum memiliki SDM yang profesional dalam bidang arsip	Pelaksanaan diklat kearsipan
	Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah jaringan	Jumlah jaringan komunikasi	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi	1. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah

	komunikasi	sebanyak 6	yang berkualitas	yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 5	Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi aktual masih terbatas, utamanya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas media cetak lokal daerah 2. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas media cetak lokal
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radiosebanyak 2, tidak ada TV lokal	Keberadaan siaran radio local yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah	1. Peningkatan fasilitasi pemerintah dalam peningkatam kualitas dan jangkauan penyiaran radio local 2. Peningkatan peran serta dalam memacu peningkatan jangkauan penyiaran radio / TV lokal
	Web site milik pemerintah daerah	Web site milik pemerintah daerah sebanyak 1	Keberadaan web site milik pemerintah daerah dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah belum aktual	1. Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah teraktual 2. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas web site pemerintah daerah
	Pameran/expo	Pameran/expo sebanyak 2 kali	Masih terbatasnya pelaksanaan promosi potensi daerah	1. Penyediaan informasi potensi daerah yang teraktual guna promosi daerah

				2. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna pameran / expo potensi daerah
	Rasio ketersediaan daya listrik		Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah	Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 84 %	Masih banyaknya rumah tangga yang belum menggunakan listrik	Peningkatan kapasitas dan daya listrik
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon sebanyak 0.18		
	Perpustakaan			
	Jumlah perpustakaan	sarana dan prasaranasebanyak 160	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan	sarana dan prasarana yang memadai
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun sebanyak 180.171	Masih rendahnya minat baca masyarakat	
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 142.975	Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang	Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
	Urusan Pilihan			
	Pertanian			

	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 56,47	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan 2. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan 3. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih bermutu 2. Penerapan teknologi pertanian 3. Penggunaan sarana produksi yang seimbang 4. Peningkatan infrastruktur pertanian
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sebesar 15,46 %		
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sebesar 54,15%		
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sebesar 12,54 %		
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sebesar 100 %		
	Cakupan bina kelompok petani	Cakupan bina kelompok petanisebesar 37,18	Masih terbatasnya akses dalam melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok	Peningkatan Sumber Daya Petani / Kelompok Penyediaan modal usaha pertanian
	Kehutanan			

	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 1,95	Banyaknya alih fungsi lahan kawasan hutan untuk fasilitas umum dan fasilitas social serta lahan pertanian dan perkebunan	Usulan perubahan fungsi kawasan hutan
	Kerusakan Kawasan Hutan		Bertambahnya lahan kritis baru	Sosialisasi, Penyuluhan, pendampingan, patroli rutin, penegakan hukum
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,66	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan non kayu	Ketersediaan tenaga kerja
	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	Pertambangan tanpa ijin	Persentase Luas Pertambangan tanpa ijin sebesar 71	1. Kurangnya tingkat kepedulian pengusaha atau perorangan terkait lingkungan 2. Menurunnya keinginan pengusaha memperpanjang ijin usaha pertambangan	Meningkatkan kegiatan pengawasan, pembinaan dan pengendalian perusahaan pertambangan
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 3,39 %	Terbatasnya wilayah ijin usaha pertambangan	Peningkatan pengawasan retribusi hasil tambang
	Pariwisata			
	Kunjungan wisata	Persentase Kunjungan wisata sebesar 88,93%	1. Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata 2. Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata	1. Promosi media cetak 2. Dukungan swasta bidang pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar	1. Promosi media cetak 2. Dukungan swasta bidang pariwisata	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, khususnya Wisata Budaya dan Wisata Alam
	Kelautan dan Perikanan			

	Produksi perikanan	Persentase Produksi perikanan sebesar 92,22	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan produksi perikanan dan peternakan
	Konsumsi ikan	Tingkat Konsumsi ikan sebanyak 45 kg	Belum seimbang antara produksi dengan kebutuhan daging ikan	Peningkatan produksi perikanan
	Cakupan bina kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan sebanyak 14 kelompok	Masih rendahnya kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Peningkatan SDM nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
	Produksi perikanan kelompok nelayan	Produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 18244,8 ton	Masih rendahnya produksi kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Peningkatan produksi kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
	Perdagangan			
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 8,24%	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Belum optimalnya kualitas Sarana dan sarana perdagangan	Peningkatan pengawasan, koordinasi dan kerjasama bidang perdagangan dengan stakeholders
	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan sebesar Rp, 95.767.000	Tidak ada kewenangan ekspor di tingkat kabupaten/kota	Kualitas dan kuantitas komoditi ekspor
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal sebesar 8,09	Belum tersedianya data kelompok pedagang yang bergerak pada sektor informal	1. Penyiapan data kelompok pedagang sektor informal 2. Pembinaan kelompok-kelompok pedagang sektor informal
	Perindustrian			
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebesar 5,18%	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya industri dan keterbatasan volume produksi sektor industri	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya industri Peningkatan volume produksi

	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sebesar 2,57 %	Keterbatasan wawasan pelaku IKM dalam hal produksi, peralatan, manajemen, akses permodalan dan pemasaran.	1. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku IKM 2. Perluasan pasar produk hasil produksi IKM
	Pertumbuhan Industri.		Keterbatasan daya kreasi dan inovasi	Fasilitasi pemanfaatan potensi daerah sektor industri.
	Cakupan bina kelompok pengrajin		Belum optimalnya sentra industri kecil dan menengah	Penguatan sentra-sentra industri melalui pendampingan teknis dan manajerial.
	Transmigrasi			
	Transmigran swakarsa			
	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB			

4.1. Isu Strategi

4.1.1. Isu Global/ Internasional

4.1.1.1. Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

Tujuan pembangunan millenium yang terdiri dari 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015 mencakup : a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, b) mencapai pendidikan dasar untuk semua, c) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, d) menurunkan angka kematian anak, e) meningkatkan kesehatan ibu, f) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, g) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan h) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan MDGs ini diperlukan koordinasi, kerjasama, dan komitmen segenap pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk memastikan kemajuan yang telah dicapai dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

4.1.1.2. Post 2015 Development Agenda

Seiring berakhirnya MDGs (tahun 2015), diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio+20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global Partnership : Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun

2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Dalam laporan tersebut, High Level Panel yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu :

a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun, apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka, dan akuntabel bagi semua

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

- e. Membina kemitraan global baru

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyongkong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus di landaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pelaku bisnis dan filantropi.

4.1.1.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah dokumen yang menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015.

Ada tiga tujuan dari SDGs, yaitu :

- a. SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun.

- b. SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian secara berkelanjutan.
- c. Target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utama SDGs sesungguhnya adalah pengentasan kemiskinan. Tetapi Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia (human development) yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development, dan lingkungan dalam skala besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

4.1.2.4.Pemanasan Global (Global Warming)

Bumi secara luas telah dibebani oleh berbagai persoalan hingga hari ini. Yang sangat menjadi perhatian adalah adanya pemanasan global. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya bencana yang cepat atau lambat akan dihadapi oleh manusia di bumi.

Pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya. Pemanasan global akan mengakibatkan lelehnya es di kutub utara yang dampak ikutannya adalah meningkatnya permukaan air laut. Kabupaten Barru sebagai sebuah wilayah yang terdiri dari pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan pulau-pulau kecil sangat rentan terkena dampak kenaikan permukaan air laut yaitu berkurangnya luasan daratan akibat tergenang oleh permukaan air laut. Bahkan hal tersebut memungkinkan tenggelamnya beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Barru.

Selain kenaikan suhu permukaan air laut, pemanasan global juga mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrim di berbagai

belahan bumi. Dampaknya kemudian sangat terasa pada berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya pada sektor pertanian dan peternakan. Perubahan iklim menyebabkan petani tidak mampu menentukan dengan tepat musim tanam yang baik sehingga hal ini mempengaruhi produktivitas sektor pertanian. Pada sektor peternakan, perubahan iklim dapat menyebabkan ternak tidak mampu memproduksi dengan baik karena adanya perubahan pola makan yang tidak baik.

4.2.1.5. Globalisasi Informasi

Globalisasi informasi dan nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan yang mana kesemuanya tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, nasional, dan regional, tetapi juga merubah paradigma lama dalam politik, ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan budaya, yang melampaui batas-batas kebangsaan.

Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi sehingga sangat diperlukan mutu modal manusia. Belum lagi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma ketimuran, akan sangat membutuhkan filterisasi sehingga dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi informasi.

4.2.1.6. Perdagangan Bebas

Akses informasi yang sangat mudah dan cepat membuat batas-batas administrasi antar negara menjadi hambatan dalam dunia perdagangan dan memicu praktek-praktek illegal dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu berbagai negara sepakat menggagas perdagangan bebas yang akan berlaku secara internasional.

Pemberlakuan perdagangan bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang, dan interaksi dengan dunia luar, disatu sisi memberi

dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Disisi lain, juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan karena keadaan ditentukan oleh kekuatan pasar. Sedikit demi sedikit peran negara akan terkikis habis sehingga akan lebih mempersulit kehidupan masyarakat miskin. Dampak selanjutnya adalah akan terjadi kerawanan sosial dan meningkatnya angka kriminalitas.

4.2.1.7. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di kawasan Asean dan terbesar ke tiga di dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Namun dalam perkembangannya Indonesia dan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika koreksi dalam hal demokrasi, terkhusus berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

4.2.1.8. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi. Pada periode ini, salah satu yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya The Asean Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Diberlakukannya MEA di tahun 2015, Asean akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil diantara negara Asean.

Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Disatu pihak akan

menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan daerah, tetapi dipihak lain juga menuntut daya saing perekonomian nasional dan daerah yang lebih tinggi.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di kawasan Asean menjadi negara yang empuk untuk menjadi pasar bagi produk negara Asean lainnya. Disamping itu akan menjadi tujuan bagi pekerja tenaga konstruksi dan profesi ekonomi lainnya mengingat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun. Kesiapan perlu dilakukan disegala bidang secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, diantaranya peningkatan daya saing perekonomian dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

4.2.2. Isu Nasional

4.2.2.1. Reformasi Birokrasi

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, masih menjamurnya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan terkait birokrasi tersebut karena belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal.

Dari sisi internal berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi, dan internal birokrasi masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari model terbaik (solusi). Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

4.2.2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama ini telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menambah kesengsaraan masyarakat. Sejak era reformasi bergulir, upaya pemberantasan KKN berlangsung semakin gencar. Langkah ini telah menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sendiri juga telah menegaskan komitmennya dalam rangka pemberantasan korupsi melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, saat ini menjadi ironi karena ditengah upaya pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap saja berlangsung, bahkan ada kecenderungan meningkat dengan berbagai modus operandi yang lebih canggih dan terorganisir. Hal ini membuat sulit dalam penanggulangan dan pemberantasannya.

Untuk itu, dibutuhkan suatu komitmen penuh dari segenap lapisan strata masyarakat dalam struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan terendah, sampai pada staf atau pegawai bawahan untuk tidak melakukan tindakan KKN ini.

4.2.2.3. Pengembangan Ekonomi Melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna

mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Peluang strategis ini yang coba ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Barru guna mengeksplor segenap potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga diharapkan akan memberikan banyak multiplier effect menuju masyarakat Kabupaten Barru yang sejahtera.

4.2.2.4. Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama Hak Azasi Manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama di Indonesia perlu diubah. Konsep pangan semacam itu dapat menjadi sumber terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain yang pernah ada. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu bisa mengindari adanya krisis pangan.

Globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada kenyataannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha membangun ketahanan pangan jangka panjang, walaupun disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu perdagangan internasional pangan yang adil. Meroketnya harga sumber energi berdampak langsung pada harga produk pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk, dan biaya transportasi. Harga-harga pangan dan pakan cenderung meningkat dan menurunkan daya beli riil masyarakat miskin.

Saat ini fenomena krisis energi semakin menguat seiring makin meningkatnya harga sumber energi dari fosil yang tidak dapat

diperbarui, sehingga mendorong berkembangnya pemanfaatan energi non fosil dan energi terbarui yang meliputi energi geothermal, energi surya, energi angin, tenaga air, dan biomas (biofuel) yang dihasilkan melalui pembakaran dan fermentasi bahan organik seperti fermentasi tebu atau jagung (yang selama ini menjadi bahan pangan) untuk menghasilkan alkohol dan ester. Kedua bahan tersebut secara teori dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil (BBM) dengan dicampur, dengan melihat fenomena sekarang ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan (trade-off) produk-produk pangan akan diperhadapkan pada dua pilihan yakni akan menjadi energi atau tetap menjadi bahan pangan. Untuk masa-masa yang akan datang konversi bahan pangan menjadi bahan bakar sebagai alternatif akan semakin tinggi.

Sebagai upaya meningkatkan pasokan tenaga listrik, dengan rasio elektrifikasi dan konsumsi perkapita yang relatif rendah demikian pula kian kritisnya kondisi pasokan tenaga listrik. Grid tenaga listrik yang terisolasi perlu dihubungkan dengan jaringan untuk menjaga kestabilan pasokan tenaga listrik, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga untukantisipasi pembangunan industri. Untuk menunjang hal tersebut, maka akan dilakukan pemanfaatan sumber daya energi lokal batubara, gas alam, geothermal, PLTA, dan energi yang dapat diperbaharui seperti tenaga matahari dan angin.

4.2.2.5. Penguatan koneksitas nasional

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Disamping itu, posisi strategis wilayah Indonesia memainkan peranan sangat penting bagi penguatan integrasi perekonomian nasional dan global.

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan koneksitas nasional masih relatif terbatas dan harus segera ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam meningkatkan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.

4.2.2.6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG), melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Tantangan pembangunan SDM meliputi :

- a. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
- b. Tantangan dalam pembangunan pendidikan
- c. Tantangan dalam mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat
- d. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa
- e. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak.

4.2.2.7. Penanggulangan kemiskinan

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentangan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk berpendapatan terbawah adalah :

- a. Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu, termasuk di dalamnya rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan.
- b. Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga.
- c. Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah :

- a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
- b. Memperbesar investasi padat pekerja
- c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil mikro dan kecil
- d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal
- e. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

4.2.2.8. Gender dan Perlindungan Anak

Kiprah kaum perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Kaum perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama, terdapat suatu kenyataan bahwa beban yang dihadapi kaum perempuan cukup berat. Misalnya angka kematian ibu melahirkan, atau masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai pada masalah kekerasan yang kerap kali menimpa kaum perempuan.

Untuk itu kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, ikut memastikan arah gerak pembangunan, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya, dimana kebijakan yang muncul akan mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Sementara itu anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan sebagai investasi sumberdaya manusia. Anak harus dipenuhi kebutuhannya, ditingkatkan kualitas hidupnya, dan dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, sangat urgen mengintegrasikan perspektif gender dan anak ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran.

4.2.3. Isu Regional/ Propinsi

4.2.3.1. RTRW Nasional dan RTRW Propinsi menetapkan Kabupaten Barru sebagai Kawasan Strategi Nasional, khususnya di kawasan EMAS (Sepe'e, Mangempang, Siawung)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2009-2013, Kabupaten Barru ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), penetapan Kabupaten sebagai KEK, merupakan peluang bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru merupakan daerah yang potensi untuk pengembangan KEK, karena memiliki kolam pelabuhan alam yang terdalam (15-25 m) sepanjang koridor pesisir barat Sulawesi-Selatan dengan memiliki potensi pengembangan kepelabuhan yang paling luas dimana kapasitas tonase kapal yang paling besar dan dengan kawasan potensi tsunami yang sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Barru sangat berpotensi untuk pengembangan KEK yaitu diwilayah Kecamatan Barru yang meliputi kelurahan Sepe'e, Mangempang dan Siawung serta Kecamatan Balusu Desa Madelo dan Desa Binuang yang biasa disingkat dengan Kawasan Emas.

Pembangunan kawasan ekonomi khusus di daerah penting mengingat negara Republik Indonesia terletak pada kedudukan strategis sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya dan memiliki sumber daya alam yang harus dikelola dan dilindungi menuju mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh sebab itu

perencanaan pembangunan regional dengan industri sebagai penggerak utama perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu mengacu kepada tata ruang, sehingga menjadi satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kemampuan daya lingkungan hidup sesuai paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan memantapkan ketahanan nasional.

Kabupaten Barru merupakan kabupaten dengan dinamika yang sangat tinggi, terutama karena posisinya yang berada di jalur utama trans Sulawesi dan berada diantara dua kota besar yaitu kota Makassar dan Pare-pare. Dari sisi perkembangan ekonomi dan industri kabupaten Barru sangat potensial antara lain tersedianya sumber daya wilayah pesisir, sumber daya pertanian, dan sumber daya mineral yang relatif masih belum sepenuhnya dikelola secara optimal.

4.2.3.2. Penyelamatan kawasan pesisir dan ekosistemnya

Wilayah pesisir dan ekosistemnya merupakan bagian sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan ekosistemnya memerlukan perencanaan yang terpadu sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir menghendaki adanya keberlanjutan, mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya. Oleh karena itu, perlu adanya kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya melalui perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan pemangku kepentingan.

4.2.3.3. Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi

Sebagai salah satu kabupaten yang baru saja keluar dari deretan kabupaten tertinggal di Indonesia tentunya membutuhkan kebijakan anggaran dari Pemerintah dalam hal upaya percepatan

pembangunan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur perekonomian, sehingga daerah ini dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju mengingat bahwa (i) Kabupaten Barru memiliki posisi yang strategis, tepat di antara poros kota Makassar dan Kota Parepare dan berada pada jalur trans Sulawesi. Posisi ini sangat strategis dalam mendukung peningkatan sistem distribusi logistik nasional, karena Kabupaten persinggahan bagi transportasi darat dan pelabuhan Garongkong merupakan pelabuhan yang selalu dilewati kapal yang berlayar dari dan menuju pulau Jawa dan KTI, (ii) Kabupaten Barru memiliki sumberdaya alam yang dapat dijadikan lokomotif pembangunan daerah, yakni pertambangan dan energi mineral, pertanian, peternakan, perikanan .

Ekonomi nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal. Hal ini sudah sangat di sadari oleh pemerintah, sehingga setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

4.2.3.4. Kehidupan beragama

Kabupaten Barru dikenal sebagai sebuah wilayah yang penduduknya agamais. Sebagai sebuah wilayah yang mayoritas penduduk beragama islam dari berbagai suku bangsa, dan juga beberapa penganut agama lain, maka kehidupan beragama di wilayah ini senantiasa perlu di kembangkan dan dibina. Pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama diperlukan karena begitu banyaknya paham dan pengaruh yang bisa mencederai keyakinan beragama dan akhlak para penganut agama. Di era sekarang ini dimana lalu lintas informasi begitu kuat dan tidak terhalang oleh jarak, maka yang menjadi penting untuk dilakukan adalah menjaga keyakinan dan

akhlak agama yang dianut oleh masing-masing juga menjaga generasi muda dari pengaruh buruk kemajuan teknologi.

4.2.3.5. Kerawanan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi dapat disebabkan oleh terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan, dan juga dapat disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal.

Kabupaten Barru merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukotanya adalah Kota Barru. Dengan luas wilayah 1174 km² yang terbagi kedalam tujuh kecamatan dan jumlah populasi 161.732 jiwa dengan jumlah Laki-laki 78.266 jiwa dan Perempuan 83.466 jiwa. Kabupaten ini memiliki kondisi alam yang kompleks yang digambarkan dengan topografi tertinggi >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06% dari luas wilayah) dan dengan kemiringan lereng >400 seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan. Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Melihat kondisi topografi kabupaten sedemikian rupa, maka dapat dikatakan Kabupaten Barru juga memiliki kerentanan terhadap berbagai bencana alam. Ketersediaan peta rawan bencana dipandang menjadi suatu hal yang sangat perlu dan bersifat mendesak ketesediaannya karena hal ini saat ini sangat berpengaruh pada beberapa sektor terkait seperti penataan ruang wilayah, baik dalam skala kabupaten maupun kecamatan dan yang paling penting adalah upaya mereduksi jumlah korban dan kerugian materi yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

4.2.4. Isu Strategis Daerah

4.2.4.1. Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- Pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
- Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran Serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

2. Urusan Kesehatan

- Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan,
- Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degenerative (Kanker, Jantung, etc)
- Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;
- Pembinaan perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
- Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana sumberdaya air untuk penyediaan kebutuhan air bersih/minum
- Penyediaan biaya pemasangan air bersih PDAM
- Masih rendahnya akses terhadap sanitasi yang layak
- Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Belum semua wilayah mempunyai Rencana Dasar Tata Ruang, produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah

- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni.
- Masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun kualitas politik dan berdemokrasi
- Cenderung menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme segenap lapisan masyarakat

6. Urusan Sosial

- Masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Tingginya konflik sosial dimasyarakat dan kejadian bencana alam.
- Penyediaan tunjangan kematian dan ta'ziah
- Masih kurang diberdayakannya panti-panti sosial
- Penyediaan beras miskin bagi penduduk miskin yang tersebar di desa/kelurahan

4.2.4.2. Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Lingkungan Hidup

- Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
- Belum optimalnya pengawasan terhadap oknum pengrusakan lingkungan
- Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku
- Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;

- Makin meningkatnya dampak kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga,
- Masih kurangnya pembinaan kepemudaan,
- Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
- Kurangnya koordinasi antar sektor yang menaungi kepemudaan dan keolahragaan.

3. Urusan Penanaman Modal

- Belum tersedianya data dan informasi peluang investasi
- Belum optimalnya pengelolaan investasi daerah
- Belum optimalnya pelayanan perizinan investasi
- Belum kondusifnya iklim investasi khususnya terkait lahan yang sangat terbatas dan masalah kepemilikan masyarakat
- Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besarterbatas.

4. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum optimalnya pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
- Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disainproduk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
- Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
- Masih terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam pemasaran
- Masih kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.
- Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

6. Urusan Tenaga kerja

- Masih terbatasnya lapangan kerja produktif
- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
- Penyediaan bantuan pertukangan, perbengkelan, dan jahit menjahit berdasarkan profesi
- Masih rendahnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja dan kelompok kerja sektor informal

7. Urusan Pertanian

- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
- Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi focus daerah,
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local cenderung menurun.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Tingginya pengaruh negative media terhadap pembentukan kepribadian anak,
- Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
- Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- Masih rendahnya keterlibatan gender dan anak dalam pembangunan

9. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi,
- Masih tingginya angka resiko melahirkan bagi ibu hamil
- Masih kurangnya tenaga penyuluh kesehatan dan keluarga berencana
- Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk

10. Urusan Perhubungan

- Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
- Dayaampung infrastruktur transportasi
- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penerapan E-Government dalam pelayanan publik
- Belum meratanya pusat-pusat informasi desa
- Masih terdapatnya wilayah-wilayah yang belum terlayani provider telekomunikasi (handphone)

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tatakelola pemerintahan desa.
- Ketidaksihdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, Pemprov, Pemkab/pemkot dan desa.
- Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM
- Belum fokus dan belum bersinerginya program-program pemberdayaan masyarakat dari pusat/provinsi dengan program pemerintah kabupaten

13. Urusan Kebudayaan

- Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.
- Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negative cukup banyak;
- Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan lokal
- Tidak tersedianya pusat studi pengkajian agama dan budaya

14. Urusan Statistik

- Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.
- Masih kurangnya pembiayaan, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data dan statistik

15. Urusan Perpustakaan

- Belum memadainya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kearsipan.
- Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah.
- Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal.
- Belum bersinerginya pengelolaan kearsipan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
- Belum memadainya sarana dan prasarana serta SDM perpustakaan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat
- Belum terkelolanya dengan baik perpustakaan
- Masih minimnya bahan bacaan perpustakaan dan kurangnya variasi bacaan

16. Urusan Pertanahan

- Kurangnya masyarakat yang memiliki dokumen pertanahan yang lengkap
- Masih tingginya masalah sengketa pertanahan

17. Urusan Persandian

- Masih kurangnya SDM yang menguasai persandian

4.2.4.3. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan,
- Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya

- Keterbatasan infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan
- Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
- Masih maraknya pelaku illegal fishing
- Masih kurangnya kajian terhadap pengelolaan sumberdaya kemaritiman
- Belum rampungnya pembangunan sentra perikanan terpadu (PPI)

2. Urusan Pertanian

- Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas;
- Alih fungsi lahan pertanian kenonpertanian masih cukup tinggi;
- Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
- Pengembangan penyediaan saranaprasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil perkebunan.

3. Urusan Kehutanan

- Degradasi hutan dan lahan;
- Alih fungsi lahan;
- Luas hutan semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan;
- Luas lahan kritis masih cukup banyak
- Belum optimalnya pengukuran luasan hutan dan batas-batasnya

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga
- Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.
- Potensi energy terbarukan seperti energy matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal

5. Urusan Pariwisata

- Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

- Belum optimalnya pengelolaan pariwisata baik destinasi, atraksi budaya dan manajemen kelembagaannya
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- Masih kurangnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- Belum optimalnya promosi wisata

6. Urusan Perindustrian

- Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM,
- Industri berbasis sumber daya lokal belum berkembang secara merata
- Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.

7. Urusan Perdagangan

- Rendahnya daya saing produksi pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,
- Belum optimalnya kesiapan menghadapi perdagangan bebas, MEA, dan lainnya
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar
- Penyediaan biaya untuk menyanggah harga komoditas andalan

8. Urusan Transmigrasi

- Masih kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
- Sulitnya menyediakan lokasi transmigrasi

4.2.4.4. Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

1. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Fungsi kelitbangan belum optimal,
- Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan,

- Belum adanya sinergitas kebijakan yang mendukung kelitbangan.

2. Urusan Perencanaan

- Masih kurangnya data pendukung perencanaan pembangunan
- Belum konsistennya mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan program, kegiatan, dan penganggarannya.
- Belum optimalnya dan belum meratanya kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan dari bawah

3. Urusan Pemerintahan Umum

- Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
- Belum Optimalnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
- Belum sesuai kompetensi pegawai dengan kebutuhan riil
- Masih kurangnya SKPD yang memiliki SOP dan SPM
- Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
- Masih lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum dan perundang-undangan
- Masih perlunya penataan struktur dan budaya organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang responsif
- Masih kurangnya reward and punishment dalam rangka peningkatan motivasi aparatur
- Penyediaan tunjangan haji/umroh bagi Guru dan PNS lainnya yang berprestasi
- Masih tingginya permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada tiap SKPD.